

NEOLIBERALISASI PENDIDIKAN ISLAMI DI ACEH: Analisis Kritis Terhadap Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008

Baun Thaib

Peneliti pada Pusat Balai Bahasa Provinsi Aceh

Abstract

In qanun of education in Aceh, it is stated that the education in Aceh should be Islamic. We cannot deny that Aceh's education is subordinate from national secular education. Therefore, it is assume that Aceh's education totally followed the national policy with all of its philosophy, ideology, politics and other values brought along. Thus, how is the real project of Islamization of education in Aceh? This article is intended to explain the implementation of Islamic education in Aceh and also the values promoted through the islamization process and figure out the concistency of its implementation toward Islamic pedagogy. By using critical analysis, the writer found that the islamization project in Aceh's education has been trapped in the mainstream of nationl education either from the aims or from the substances. Thus, the face of Islamic education in Aceh is just in the artificial aspect such as wearing Islamic uniform at school, adding Islamic subject and segregating of boys and girls in the classroom.

Abstrak

Meskipun dalam Qanun Pendidikan Aceh dinyatakan bahwa pendidikan di Aceh adalah pendidikan islami , namun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Aceh merupakan subordinasi dari pendidikan nasional yang sekuler. Dengan demikian, diasumsikan pendidikan di Aceh sepenuhnya tunduk dan patuh pada kebijakan pendidikan yang berlaku secara nasional dengan seperangkat filosofi, idiologi, politik, dan nilai-nilai yang dibawanya. Jadi apa dan bagaimana sebenarnya proyek islamisasi pendidikan di Aceh? Artikel ini bermaksud menguji dan mendiskusikan nilai-nilai yang melekat baik pada sistem penyelenggaraan pendidikan publik di Aceh maupun nilai-nilai yang dipromosikan melalui proses islamisasi tersebut, apakah sepenuhnya konsisten dengan pedagogi Islam atau tidak. Dengan menggunakan pendekatan pendidikan kritis, penulis menemukan bahwa proyek islamisasi pendidikan di Aceh telah terjebak dalam mainstream pendidikan nasional baik dari sisi tujuan maupun substansinya. Oleh karena itu, wajah pendidikan islami di Aceh hanya tampak pada aspek -aspek artifisial semata, seperti pakaian sekolah, penambahan mata pelajaran Islam, dan pemisahan laki-laki dan perempuan dalam kelas.

Kata Kunci: *pendidikan islami , neoliberalisasi, marketisasi.*

PENDAHULUAN

Sebagai wujud implementasi syariat Islam secara kaffah di Aceh, upaya formulasi dan legalisasi syariat Islam dalam berbagai bidang kehidupan terus berkembang. Dimulai dari pengesahan Qanun yang mengatur tentang aspek ibadah, akidah, syiar Islam, dan muamalah, formalisasi syariat Islam terus bergerak dan meluas sesuai dengan tuntutan masyarakat dan implementasi UU Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dalam konteks ini, maka islamisasi juga berlaku pada aspek pendidikan. Keinginan mewujudkan pendidikan yang islami telah dituangkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2008 yang secara tegas menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di Aceh didasarkan pada nilai-nilai islami (BAB III pasal 5 ayat 2) dan harus sesuai dengan kekhususan karakteristik dan budaya masyarakat Aceh yang islami (Bab II pasal 2). Qanun ini merupakan jabaran dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan Qanun ini, penyelenggaraan pendidikan di Aceh dibangun di atas dua asas penting (yaitu, keislaman dan karakteristik Aceh) di antara sekian banyak asas lain (Bab II pasal 2) dan berfungsi sebagai upaya pengembangan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang berperadaban dan bermartabat. Karakteristik manusia yang ingin diwujudkan oleh pendidikan Aceh yang islami adalah: (1) beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhānahu wa Ta'āla; (2) berakhlak mulia; (3) berpengetahuan; (4) cerdas; (5) cakap; (6) kreatif; (7) mandiri; (8) demokratis; dan (9) bertanggungjawab.

Meskipun dinyatakan bahwa pendidikan Aceh dibangun di atas fondasi keacehan dan keislaman, akan tetapi pendidikan yang berlaku di Aceh bukanlah sistem pendidikan yang sepenuhnya otonom dan independen, melainkan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Artinya, pendidikan Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, pendidikan Aceh menerima, melaksanakan, dan tunduk pada kebijakan pendidikan yang berlaku secara nasional dengan seperangkat ideologi, politik, dan nilai-nilai

yang dibawanya (Bab V pasal 16). Jadi, otonomisasi pendidikan sebenarnya hanya mengambil bentuk desentralisasi yang paling lemah, yaitu sebatas pelimpahan sebagian kewenangan manajerial kepada Pemerintah Daerah. Sementara itu, berbagai keputusan fundamental dalam pengelolaan pendidikan dan nilai-nilai pendidikan yang tumbuh dan berkembang dalam sistem pendidikan nasional masih tetap dalam genggaman otoritas Pemerintah Pusat.¹

Dalam konteks ini, pendidikan nasional tidak pernah menyebut Islam secara eskplisit sebagai landasan filosofis dan operasionalnya. Secara formal, landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Namun demikian, penelaahan secara seksama terhadap tujuan dan orientasi, model pendidikan yang dikembangkan, desain kurikulum, dan berbagai kebijakan pendidikan nasional, memberikan gambaran betapa pendidikan nasional sebenarnya lebih condong kepada pendidikan Barat (Amerika Serikat). Jadi, meskipun sebagian kalangan menganggap bahwa filosofi dan kebijakan nasional pendidikan Indonesia tersebut tidak bertentangan dengan/dijiwai oleh nilai-nilai islami, namun keinginan dan inisiatif untuk mewujudkan pendidikan islami di Aceh menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan nasional disertai niat untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun pendidikan yang lebih baik terutama dalam konteks lokal dengan menjadikan Islam sebagai asas dan prinsip penyelenggaraannya.

Yang menjadi persoalan adalah apakah proses penerapan pendidikan islami di Aceh sudah sejalan dengan nilai dan prinsip dasar pendidikan Islam atau justru hanya memasukkan unsur-unsur atau simbol-simbol Islam ke dalam mainstream pendidikan nasional yang notabene dalam banyak hal dipenuhi nilai-nilai filosofi Barat (materialisme dan pragmatisme)?

Artikel ini bertujuan mendorong berbagai pihak mengkritisi dan menguji secara kritis nilai-nilai yang melekat baik pada sistem penyelenggaraan pendidikan publik di Aceh maupun nilai-nilai yang dipromosikan melalui proses islamisasi tersebut, apakah sepenuhnya konsisten dengan pedagogi Islam atau tidak. Menggunakan paradigma pendidikan kritis dan Islami, makalah ini akan mendiskusikan dan menguji konsistensi agenda islamisasi pendidikan Aceh

¹Bentuk desentralisasi yang paling lemah adalah dekonsentrasi. Baca selengkapnya dalam M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal.232.

terhadap substansi pendidikan Islam, lalu menyingkap apa sebenarnya tujuan pendidikan/sekolah di Aceh dalam konteks kekinian. Analisis ini mengacu pada sumber normatif dan praktis, yaitu Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai landasan legal formal pelaksanaan pendidikan di Aceh serta hasil pengamatan praktik-praktik pendidikan yang berlaku secara umum di dalam masyarakat.

Alasan penggunaan dua pendekatan ini didasarkan pada adanya titik temu yang signifikan—tentu saja juga memiliki perbedaan-perbedaan mencolok—antara cara pandang pendekatan kritisisme yang berakar pada filosofi rekonstruksionisme dan progresifisme dengan pendekatan dan filosofi pendidikan Islam terhadap pendidikan. Baik paradigma pendidikan kritis maupun islami sama-sama menjadikan pendidikan sebagai basis perubahan dan sarana transformasi menuju tatanan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan kritis sebagaimana pendidikan Islam memandang bahwa modernisme pada titik tertentu telah mengakibatkan lahirnya eksploitasi, diskriminasi, dan ketidakadilan secara global. Modernisme yang lahir dari filsafat positivistik cenderung menjadikan pendidikan semata-mata mengejar kesejahteraan ekonomi (materi) dan mengabaikan pentingnya tujuan-tujuan spiritual dan religius.

PEMBAHASAN

Konteks, Orientasi, dan Muatan Pendidikan islami Aceh

Pendidikan Aceh pascatsunami dan perjanjian damai Helsinki, setidaknya dapat dilihat dalam tiga konteks yang saling terkait. Pertama, globalisasi yang sedang berlangsung bukan sekadar fenomena kemajuan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa berbagai kemudahan.² Revolusi teknologi sebagai pilar utama globalisasi telah memicu lahirnya masyarakat informasi (*information society*) di mana pendidikan memegang peran penting dalam segala aspek kehidupan. Hal ini telah melahirkan tantangan yang luar biasa bagi para pendidik untuk memikirkan kembali prinsip-prinsip dasar yang akan dipakai dalam menyikapi perkembangan teknologi secara kreatif

² Yusuf Al-Qardhawi, *Islam dan Globalisasi Dunia*, terjemahan dari buku *Al-Muslimun wa al-Aulamah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. I, 2001.

dan produktif serta merestrukturisasi pendidikan untuk merespon secara konstruktif dan progresif perubahan-perubahan sosial yang melanda dunia.³ Dalam konteks ini, pemerintah dan masyarakat Aceh menyadari pentingnya membangun sistem pendidikan yang yang dapat mempersiapkan generasi muda dan masyarakat untuk dapat membangun kehidupan yang lebih baik dalam kancah globalisasi dunia dengan karakteristik perubahan yang serba cepat, tidak pasti (*uncertainty*), dan tak bisa diprediksi (*unpredictable*).

Kedua, syariat Islam telah menjadi keputusan politik nasional. Keputusan ini mendapat dukungan dan tanggapan positif secara luas dari masyarakat Aceh. Syariat Islam diasumsikan sebagai salah satu solusi dari konflik politik antara Aceh dan Indonesia serta instrumen sosial dalam pembangunan kembali Aceh. Syariat Islam juga diasumsikan sebagai sumber nilai dalam menyikapi perkembangan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi secara global. Harus diakui, proses globalisasi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan nilai-nilai agama dan sosial. Agama (Islam) diyakini mampu memainkan peran penting dalam mengawal proses globalisasi dan memberikan beragam solusi bagi persoalan-persoalan sosial yang ditimbulkannya.

Di Aceh, syariat Islam bukan barang baru, melainkan memiliki akar historis dan budaya yang kuat di Aceh sehingga formalisasi syariat Islam merupakan reaktualisasi dan penguatan implementasi ajaran Islam yang harus dilaksanakan secara sempurna (*kaffah*). Islam harus menjadi basis nilai yang terinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem pendidikan yang mengacu pada ajaran Islam yang berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai ajaran Islam sekaligus sebagai perangkat sosial pembangunan Aceh ke arah yang lebih baik.

Ketiga, sistem pendidikan nasional yang masih carut-marut di mana pendidikan Aceh menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kondisi tersebut, bahkan diperparah lagi dengan dua bencana sosial, yaitu konflik bersenjata selama lebih kurang 30 tahun ditambah tsunami. Kondisi ini telah mendorong lahirnya komitmen untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain di Nusantara

³Douglas Kellner, "Toward a Critical Theory of Education", <http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/>, diakses tanggal 10/6/2010.

disertai upaya untuk membangun sistem pendidikan yang lebih bermutu dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki.⁴

Ketiga konteks ini memperlihatkan bagaimana Aceh merancang pendidikan yang di satu sisi akomodatif terhadap globalisasi dunia dan di sisi yang lain berupaya mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dan mempercepat pencapaian tujuan dan target pendidikan nasional demi percepatan pembangunan kembali Aceh secara komprehensif. Strategi yang diambil adalah aktualisasi dan implementasi ajaran Islam secara sempurna dengan pemberlakuan syariat Islam. Islam diyakini dapat memberikan solusi dari berbagai persoalan ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam membangun Aceh yang bermartabat dan berperadaban dalam kancah kehidupan global. Untuk itu, pendidikan menempati peran sentral sebagai pembentukan agen sosial (Sumber Daya Manusia) yang dapat menjalankan misi dan mewujudkan visi sosial yang selaras dengan Islam. Oleh karena itu, pendidikan yang dibangun harus dapat menjadi wahana internalisasi nilai-nilai islami dan dengan tetap secara konsisten menjalankan syariat Islam secara sempurna dan menjadikan Islam sebagai asas penyelenggaraan pendidikan. Komitmen ini dibangun berpijak pada UUPA No. 11 Tahun 2006 yang menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai islami.

Komitmen penyelenggaraan pendidikan islami di Aceh sebenarnya telah muncul sejak penerapan syariat Islam secara formal di Aceh. Hal ini tertuang dalam Qanun Aceh No. 53 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansial aturan penyelenggaraan pendidikan islami di Aceh telah ada sejak tahun 2003 dan telah berlangsung/dilaksanakan hampir sembilan tahun. Selama hampir satu dasawarsa pelaksanaan pendidikan islami di Aceh belum menunjukkan kiprah yang berarti. Praktik pendidikan yang berlangsung masih mengikuti tren yang berlaku pada sistem pendidikan nasional dalam pelaksanaan pendidikan publik. Otonomi pendidikan tidak mampu diterjemahkan secara nyata sehingga politik dan kebijakan pendidikan yang diambil belum sepenuhnya mengacu pada filosofi dan kepentingan daerah. Berbagai produk kebijakan pendidikan nasional seperti Badan Standarisasi Pendidikan Nasional, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Ujian

⁴ Bandingkan dengan bagian Penjelasan atas Qanun Aceh No. 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Qanun Aceh No. 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh, 2008, hal. 29.

Nasional, Sekolah Internasional, dan Badan Hukum Pendidikan ditelan bulat-bulat tanpa resistensi dan kritik.

Penyelenggaraan pendidikan islami baru pada tataran permukaan, bersifat simbolis, dan formalistik. Hal ini setidaknya tampak pada tiga aspek yang amat menonjol, yaitu tujuan pendidikan, lingkungan belajar dan kurikulum. Artinya, pendidikan islami hanya dimaknai sekadar penampilan sehingga yang lebih diperhatikan adalah bagaimana membentuk lingkungan sekolah/belajar yang dianggap islami seperti aturan berpakaian, penyediaan musala pada setiap sekolah, dan pemisahan ruang belajar siswa laki-laki dan perempuan.

Selain itu, pendidikan islami juga cenderung dipahami dalam persepektif subjek/mata pelajaran sehingga muncullah pelajaran-pelajaran Islam seperti Qur'an-Hadis, Fiqh, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan lain sebagainya. Hal ini berlangsung tanpa kritik serta refleksi pemikiran yang lebih luas dan mendalam tentang apa sebenarnya yang islami dalam pendidikan sehingga hal-hal yang lebih esensial daripada sekadar lingkungan belajar dan integrasi kurikulum menjadi terabaikan. Para pemangku kepentingan pendidikan sibuk dengan urusan-urusan yang tidak menyentuh substansi pendidikan Islam sehingga melupakan apa sebenarnya yang ingin dicapai dari praktik pendidikan yang dijalankan.

Fenomena tersebut menjadikan praktik pendidikan islami di Aceh hanya berkuat pada aspek-aspek yang artifisial, tidak pada hal-hal yang fundamental dan esensial. Pendidikan Aceh belum beranjak dari mainstream pendidikan publik yang berlangsung secara nasional, bahkan global. Pendidikan publik/sekolah yang berkembang sekadar membahani peserta didik dengan seperangkat pelajaran dan keterampilan untuk melahirkan individu konsumeristik yang sesuai dengan tuntutan pasar. Praktik ini telah menjadikan standarisasi kurikulum, standarisasi tes/ujian, dan kompetisi sebagai nilai-nilai utama dan mencampakkan nilai-nilai persamaan, kerja sama, solidaritas dan empati, serta isu-isu keadilan sosial keluar dari area sekolah dan aktivitas pendidikan. Sekolah/pendidikan hanya menjadi instrumen reproduksi nilai-nilai ideologis ekonomis yang dominan dan cenderung mengikis nilai-nilai sosial humanis dari sekolah sehingga gagal melahirkan individu yang kreatif, kritis, dan transformatif.

Mengintegrasikan muatan/ajaran Islam ke dalam model sekolah/pendidikan yang jelas-jelas telah gagal dalam menumbuhkan potensi-potensi kemanusiaan yang tak lebih dari sekadar kebutuhan terhadap pekerjaan tentu saja harus dikritisi secara reflektif. Penulis berasumsi bahwa praktik pendidikan islami yang dipahami dalam batas-batas lingkungan belajar dan muatan kurikulum saja cenderung telah menipu, mendistorsi, dan merusak watak ideal pendidikan islami itu sendiri. Lebih jauh, tanpa aktualisasi esensi tujuan pendidikan islami secara konsisten, maka pendidikan islami akan terjebak dan dimanipulasi untuk melegitimasi mainstream praktik pendidikan publik yang berjalan dan tanpa disadari “diberdayakan” untuk mendukung ideologi tertentu.

Agenda Neoliberal Kapitalis dalam Pendidikan

Ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan nasional Indonesia sebenarnya sudah nyaring terdengar terutama sejak tumbangannya pemerintahan Orde Baru tahun 1998. Reformasi dipahami tidak sekadar pergantian rezim politik dan perubahan birokrasi, melainkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, tuntutan dilakukannya reformasi menyeluruh di bidang pendidikan juga mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Pendidikan Orde Baru dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak bisa diharapkan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Pendidikan Orde Baru dianggap sentralistik, indoktrinatif, seragam, dan hanya menjadi alat politik penguasa.

Untuk mengakomodasi arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan yang luar biasa di bidang teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi, maka bangsa Indonesia membutuhkan pendidikan yang mampu menciptakan manusia yang inovatif, kreatif, dan kompetitif. Akan tetapi, gerakan reformasi pendidikan yang didengungkan berbagai pihak tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga sampai saat ini kritik terhadap carut-marut sistem pendidikan nasional tidak pernah surut.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa reformasi pendidikan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Selain pendidikan membutuhkan proses yang tidak singkat dan melibatkan berbagai pihak, pendidikan juga tidak terlepas dari

faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik baik pada tataran lokal, nasional, maupun global. Hal ini membuat sistem pendidikan nasional tidak dapat dipahami tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial ekonomi dan politik yang sedang berjalan. Setiap kebijakan pendidikan selalu saja bertali-temali dengan keseluruhan aspek-aspek tersebut dalam tingkatan dan pola yang variatif. Dalam konteks ini, kekuatan global kapital yang mendominasi dunia sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2 telah menancapkan pengaruh yang cukup kuat dalam membentuk formasi pendidikan dunia termasuk dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

Penetrasi kekuatan global dalam bentuk modal yang melahirkan ekonomi kapitalisme dengan paham neoliberal dalam pendidikan nasional adalah kenyataan yang sulit dibantah. Berpuluh tahun Indonesia adalah negara pengutang di lembaga-lembaga kapital dunia seperti IMF, World Bank dan ADB. Sebagai donor yang memegang prinsip ekonomi, tentu saja lembaga-lembaga tersebut tidak memberikan utang begitu saja melainkan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan misi dan tujuan lembaga-lembaga tersebut tanpa mempertimbangkan kepentingan dan nasib negara dan bangsa kreditur.

Meskipun kapitalisme telah mengalami pasang surut sejak pertengahan abad ke-20 dan jatuh pada krisis yang cukup parah pada tahun lalu hingga kini sebagai akibat tingginya tunggakan kredit, namun respon politik terhadap kapitalisme dari negara-negara pendukung utamanya di seluruh belahan dunia tidak pernah menyalahkan sistem kapitalis, tidak juga menunjukkan adanya itikad baik untuk mereformasi bentuk neoliberal dari kapitalisme. Kritik mereka hanya ditujukan pada dua aspek neoliberalisme yaitu: pertama, apa yang mereka lihat sebagai perluasan deregulasi secara berlebihan (*over extent deregulation*), dan kedua, tingginya pembayaran dan *reward* yang diterima oleh bankir-bankir besar. Tidak ada kritik tentang kapitalisme itu sendiri sebagai sebuah sistem.

Kapitalisme bukanlah sistem yang ramah. Kaum plutokrat (orang-orang kaya) baik secara esensial maupun sosial bukanlah kelompok pemurah. Bagi kapitalisme keuntungan adalah tuhan. Dalam sistem kapitalis, keinginan untuk memperoleh profit yang tak terbatas merupakan motor dari segala kebijakan, bukan kebaikan dan kesejahteraan publik (sosial). Privatisasi sarana dan prasarana publik seperti sistem *railway* (rel kereta api), tol, pelayanan kesehatan (klinik dan rumah sakit) dan pendidikan (sekolah, lembaga kursus, pendidikan vokasional, dan

universitas), air bersih, listrik dan gas, dijalankan lebih sebagai pabrik dan mesin pencetak uang untuk memaksimalkan laba bagi pemilik, daripada untuk pemenuhan pelayanan bagi publik dan pencapaian kesejahteraan rakyat.⁵

Kebijakan global neoliberalisme sebagai wajah dominan kapitalisme yang lebih sering disebut dengan liberalisasi ekonomi dapat dilihat dari butir-butir Konsensus Washington (1989) yaitu; (1) disiplin fiskal, (2) pengurangan belanja negara, (3) reformasi perpajakan, (4) liberalisasi suku bunga, (5) kurs mata uang dengan mempertimbangkan daya saing, (6) liberalisasi sektor perdagangan, (7) liberalisasi investasi asing, (8) privatisasi, (9) deregulasi, dan (10) perlindungan hak cipta.⁶

Dampak terbesar ekonomi neoliberal kapitalis dalam pendidikan adalah kebijakan untuk mengadopsi pendidikan ke dalam kepentingan bisnis dan pada saat yang sama menekan pengeluaran (belanja) negara terhadap pendidikan yang kemudian melahirkan kebijakan privatisasi dengan alasan efisiensi dan efektivitas serta marketisasi bidang pendidikan dengan alasan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Hirtt mencatat bahwa bagi neoliberal kapital, adalah mungkin dan bahkan direkomendasikan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih terpolarisasi..., pendidikan tidak seharusnya mentransmisikan nilai-nilai kebudayaan umum yang lebih luas bagi mayoritas pekerja masa depan (*future workers*). Pendidikan lebih baik hanya mengajarkan beberapa skill dan keterampilan dasar umum.⁷

Pendidikan bagi kaum kapitalis hanya bertujuan mencetak individu yang siap memasuki pasar kerja. Oleh karena itu, pendidikan tidak perlu (atas nama efisiensi) menghabiskan banyak modal untuk pendidikan. Prinsipnya, jika hanya untuk bekerja di dunia korporasi milik para konglomerat dan perusahaan-perusahaan kapitalis sebagai buruh mengapa harus mengajarkan mereka pengetahuan dan keterampilan yang lebih dari keperluan untuk itu. Pendidikan

⁵ Bandingkan dengan Nelly Stromquist dalam Ahmar Mahboob, "Neoliberalism and Madrasas: an Unholy Connention", <http://www.chowk.com/articles/12839>, diakses tanggal 16/10/2007.

⁶ John Williamson (ed.), "What Washington Means by Policy Reform" dalam *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?* Washington, D.C: Institute for International Economics, 1990. Baca juga Sunarsip, "Menggugat Neoliberalisme?", *Republika*, 8 Juni 2009.

⁷N. Hirtt, "Three Axes on Merchandisation", *European Educational Research Journal*, <http://www.wwords.co.uk/eeerj/>, diakses tanggal 20/6/2011.

untuk tujuan yang lebih luas hanya pemborosan yang akan menghabiskan uang negara (pemilik modal) dan sangat mungkin mengancam eksistensi sistem kapitalis yang telah mapan.⁸

Lebih lanjut, neoliberal kapitalis amat memahami keyakinan umum yang berkembang bahwa pendidikan adalah aspek strategis dalam kehidupan manusia terutama dalam konteks transmisi nilai-nilai politik dan ideologis. Para pendidik dan budayawan memberikan implikasi luas dalam proses-proses reproduksi ekonomi, budaya, dan ideologi. Oleh karena itu, pendidikan harus dikontrol demi kepentingan kapitalisme. Hal ini dilakukan dengan proyek restrukturisasi praktik sekolah dan sistem pendidikan yang dapat bertindak sebagai perangkat yang dapat menjaga stamina dan keberlangsungan kapital, kapitalis, dan kapitalisme.⁹ Agenda global kapitalis neoliberal dalam pendidikan setidaknya dapat dipahami dalam dua konteks:

Pertama, pemotongan belanja publik. Bukan hanya menjadikan pendidikan dan media sebagai instrumen yang berfungsi sebagai agen kapitalisme, tapi kapitalis juga menghendaki pengurangan anggaran publik dan mendorong terjadinya mekanisme pasar yang dibungkus dalam istilah partisipasi dan tanggung jawab publik dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan publik lainnya. Logikanya, pengurangan belanja publik akan menghemat pengeluaran modal kapital (negara/lembaga) dan memberikan peluang yang lebih besar bagi para pemodal untuk menguasai dan mengontrol wilayah-wilayah tersebut.

Paket kebijakan ini hadir dalam bentuk privatisasi dan standarisasi pendidikan. Kekuatan neoliberal kapitalis mendorong negara untuk melakukan privatisasi dan melepas kontrol pemerintah terhadap berbagai sarana pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan kepada mekanisme pasar sebagai stimulus ekonomi kepada negara yang bersangkutan. Hal ini akan berdampak pada menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan privat (swasta) yang menawarkan paket-paket-paket pendidikan dan pelatihan yang beragam. Dalam iklim

⁸ Bandingkan dengan Dave Hill, "Class, The Crisis of Neoliberal Global Capital, and The Role of Education and Knowledge Workers", <http://radicalnotes.com/2009/03/28/class-the-crisis-of-neoliberal-global-capital-and-the-role-of-education-and-knowledge-workers/>, diakses tanggal 4/3/2013.

⁹ David Kelsh, "The Culturalization of Class and the Occluding of Class Consciousness: The Knowledge Industry in/of education," *Journal for Critical Education Policy Studies*, <http://www.jceps.com/index.php?pageID=articlesID=59>, diakses tanggal 27/4/2010.

keterbatasan pemerintah untuk menyediakan akses dan layanan pendidikan yang bermutu, membuat lembaga-lembaga ini mampu eksis dan muncul sebagai lembaga pendidikan alternatif. Keleluasaan dalam penarikan dana publik dan pengelolaan anggaran menjadi faktor pendukung mereka untuk memberikan paket layanan pendidikan/pelatihan yang jauh lebih bermutu daripada lembaga-lembaga pendidikan negara sehingga mereka mampu merebut pasar. Akan tetapi, kondisi ini telah melahirkan polarisasi, kesenjangan, dan meningkatnya biaya pendidikan. Tentu saja kondisi ini amat menguntungkan kaum kapital, orang kaya, dan kelas sosial tinggi. Sementara orang miskin dan kelompok sosial kelas menengah ke bawah tetap berada dalam keterpurukan.

Kedua, kapital dan bisnis pendidikan. Kapitalis memiliki agenda untuk pendidikan, dalam pendidikan, dan agenda untuk bisnis pendidikan. Agenda untuk pendidikan berpusat pada produksi sosial kekuatan buruh (kapasitas manusia untuk bekerja) demi perusahaan-perusahaan kapitalis. Agenda dalam pendidikan berfokus pada upaya menjadikan pendidikan sebagai lahan bebas bisnis demi keuntungan (*profit making*).¹⁰ Sementara itu, agenda untuk bisnis pendidikan berhubungan dengan rencana besar bisnis pendidikan (*edubusiness*) negara-negara kapitalis untuk mengeruk keuntungan dari privatisasi dan marketisasi dunia pendidikan global.¹¹ Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah dan pendidikan terlibat dalam reproduksi ideologi dan ekonomi untuk melanggengkan sistem kapitalis. Kapitalis menyadari bahwa pendidikan dan media merupakan dua aparat negara pembentuk ideologi dominan. Kapitalis berupaya menampilkan bahwa ideologi dan ekonomi kapitalis sebagai sesuatu yang alami, bebas, dan demokratis. Di sisi lain, segala kritik dan serangan yang ditujukan kepada pasar bebas diopiniikan sebagai sikap antidemokrasi dan kebebasan. Segala bentuk protes terhadap kapitalisme dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kebebasan dunia dan demokrasi itu sendiri. Melalui pendidikan dan media, kapitalisme ingin mempertahankan hegemoni dengan memperdayai publik bahwa neoliberalisme, persaingan, privatisasi, pelayanan publik yang lemah, dan tingginya kesenjangan antara kaya dan miskin adalah sah. Jika tidak maka akan terjadi krisis delegitimasi.

¹⁰ Dave Hill, "Global Neoliberalism, the Deformation of Education dan Resistance", *Journal for Critical Education Policy Studies*, <http://www.jceps.com/index.php?pageID=articleandarticlesID=7>, diakses tanggal 20 Juni 2010.

¹¹ Dave Hill, "Global Neoliberalism..."

Pemerintah dan sistem yang belaku akan dipandang tidak adil dan tidak manusiawi.

Untuk meminimalisasi delegitimasi ini dan memastikan bahwa mayoritas publik berpikiran bahwa pemerintah dan sistem ekonomi yang berjalan di atas monopoli pribadi dan kelompok adalah alami dan sah, maka negara/pemerintah menggunakan aparat ideologisnya seperti sekolah, universitas, dan institusi pendidikan lain serta media untuk menaturalisasi kapitalisme dan neoliberalisme yang tujuannya adalah agar *status quo* dipandang sebagai sesuatu yang alami dan wajar. Pada kondisi tertentu, jika ini tidak berhasil, maka aparat negara akan bertindak represif dengan alasan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban secara literal, misalnya dengan menerjunkan pasukan anti huru-hara, operasi intelijen, *water cannon*, penangkapan, atau bahkan tindakan ofensif.

Yang kedua, kapitalis ingin menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis untuk menghasilkan uang dengan berbagai strategi misalnya dengan privatisasi dan menjual barang dan jasa kepada sekolah/universitas dan lembaga-lembaga pengelola pendidikan. Di belahan Amerika Utara, banyak universitas yang telah mengadopsi praktik dan manajemen perusahaan. Mereka bertindak bukan saja sebagai partner bisnis, melainkan sekaligus benar-benar telah menjadi institusi bisnis dengan sendirinya. Mereka mengembangkan aktivitas-aktivitas yang berorientasi laba/menarik keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya universitas, fakultas, dosen dan mahasiswa.¹²

Sejalan dengan orientasi laba yang sebesar-besarnya, neoliberalis menangkap dengan baik peluang bisnis yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan esensial umat manusia sehingga setiap orang akan berusaha dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pasar pendidikan dapat dikatakan seluas dunia di mana komoditasnya dapat dijual kepada seluruh penduduk bumi. Meraih dan menguasai pasar ini bukan saja mendatangkan keuntungan yang tak terhingga besarnya, tetapi juga berarti memiliki peluang untuk mengontrol dan mengendalikannya sesuai dengan misi dan kepentingan kaum kapitalis.

¹² Les Levidow, "Marketizing Higher Education: Neoliberal Strategies and Counter-Strategies", *Cultural Logic*, Vol. 4, No. 1, Fall, 2000. <http://clogic.eserver.org/4-1/levidow.html>, diakses tanggal 9/6/2010.

Tujuan akhirnya yaitu untuk menarik kembali modal yang ditanamkan (umumnya negara-negara kaya dan kekuatan ekonomi dominan baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global) dengan mendukung perusahaan-perusahaan transnasional mereka untuk menarik keuntungan dari proyek privatisasi dan neoliberalisasi pendidikan global. Singkatnya kapitalis dengan neoliberalisme pendidikannya menginginkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kepentingan bisnis mereka sekaligus mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari penyelenggaraan pendidikan pada segala tingkatan. Pendidikan hanya ditujukan untuk menciptakan kekuatan pekerja (*labour force*) untuk memasuki pasar kerja yang sepenuhnya berada dalam genggaman korporasi para pemodal.

Di Indonesia, mainstream pendidikan neoliberal yang mewakili kaum kapitalis ini telah mewarnai praktik pendidikan sejak lama dan masih kentara hingga kini. Pendidikan nasional sangat berorientasi pasar kerja dan motif ekonomi. Hal ini misalnya dapat dipahami dengan sangat gamblang dari rencana strategis pendidikan nasional 2004—2009 yakni, terciptanya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan, dan membaiknya tata kelola dan akuntabilitas pendidikan. Formasi konsep Renstra tersebut mengindikasikan betapa konsep-konsep dan istilah ekonomi mendominasi filosofi dan teori pendidikan yang dianut. Tidak salah jika kemudian mendiknas mengartikulasikan rencana strategis (Renstra) tersebut dengan perspektif ekonomi kapitalis pula. Menurutnya, pendidikan nasional yang berlaku saat ini diarahkan pada penciptaan masyarakat Indonesia yang memiliki kecerdasan, berdaya saing dalam era kompetisi, dan berkompeten.¹³

Wajarlah jika kemudian, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dewasa ini ditandai dengan tingginya penghargaan terhadap kecerdasan (kognitif), kompetisi (daya saing), standar, kemampuan individual, dan akuntabilitas untuk meraih tujuan-tujuan yang bersifat material ekonomis semata. Pendidikan nasional lebih mengutamakan nilai-nilai ekonomi daripada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan (humanis). Sekolah (pendidikan) semata-mata didedikasikan untuk

¹³ Pernyataan ini disampaikan oleh Mendiknas Bambang Soedibyo dalam acara penganugerahan penghargaan pendidikan di Jakarta. Baca Kompas Cyber Media, “Pencapaian Renstra Pendidikan Nasional Baru Separuh”, edisi Kamis, 17 Agustus 2007, <http://www2.kompas.com/ver1/Dikbud/0708/16/203303.htm>, diakses tanggal 20/9/2010.

melatih peserta didik untuk mendapatkan pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Kesuksesan dipahami sekadar keberhasilan memperoleh pekerjaan dan kemampuan memperoleh uang.

Neoliberalisme dan Ancaman terhadap Pendidikan Islami Aceh

Proyek neoliberal saat ini yang merupakan tahap akhir dari proyek kapitalis ditujukan membentuk pemahaman publik mengenai tujuan institusi dan perangkat publik seperti sekolah, universitas, dan perpustakaan. Di sekolah, pelaksanaan testing/ujian tentang kurikulum yang didesain terlebih dahulu (*pre-designed curricula*) dengan model *high stake testing* (berimplikasi terhadap masa depan anak seperti UAN), skema akuntabilitas (di Indonesia dilakukan dengan akreditasi oleh Badan Akreditasi), bertujuan merestorasi sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya ke dalam apa yang oleh elit dominan—kelas kapitalis—dipersepsikan sebagai “peran tradisional” mereka, yaitu produksi pekerja/warga negara pasif yang memiliki skill secukupnya untuk menjadikan mereka tetap berguna bagi kebutuhan kapital.¹⁴ Kaum kapitalis menyadari bahwa kaum buruh merupakan aset yang harus dikontrol, karena dengan merekalah segala produk bisa diolah menjadi uang (*profit*). Oleh karena itu, pendidikan harus dikendalikan sesuai dengan agenda neoliberal.

Analisis Marxis yang dilakukan oleh Glenn Rikowski dalam “*Battle in Seattle*” (2001) menunjukkan bagaimana pendidikan disesuaikan dengan agenda neoliberal. Ia berpandangan bahwa guru adalah pekerja yang paling berbahaya, karena peran spesial mereka dalam membentuk, mengembangkan, dan memaksa komoditas satu-satunya yang membuat sistem kapitalis tetap eksis (kekuatan buruh). Dalam proses peburuhan versi kapitalis, kekuatan buruh harus ditransformasi ke dalam penciptaan nilai, bahkan pada titik tertentu harus dapat menghasilkan nilai surplus (*surplus value*).¹⁵

Guru adalah figur yang berbahaya karena mereka terhubung secara intim dengan proses reproduksi kekuatan buruh, membekali mereka dengan skill, kompetensi, kemampuan, pengetahuan, sikap dan kulaitas kepribadian yang dapat

¹⁴Dave Hill, “Class, Capital and Education in this Neoliberal and Neoconservative Period”, <http://libr.org/isc/issues/ISC23/B1%20Dave%20Hill.pdf>, diakses tanggal 20/9/2010.

¹⁵ Dave Hill, “Global Neoliberalism...”

dieskpresikan dan dikembangkan dalam proses perburuhan. Guru adalah pembimbing kualitas kekuatan buruh. Potensi dan dan kekuatan laten ini membuat representasi dari negara tidak bisa tidur nyenyak karena mengkhawatirkan peran mereka dalam memastikan bahwa buruh masa depan harus dapat memasuki pasar kerja dengan kualitas setinggi mungkin.

Rikowski menyatakan bahwa negara berkepentingan untuk mengontrol proses ini karena dua alasan. Pertama untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Kedua, berupaya memastikan bahwa model pendidikan yang merupakan antitesis terhadap produksi kekuatan buruh tidak boleh hadir. Berdasarkan analisis ini, jelas bahwa negara kapitalis akan bekerja keras untuk menghancurkan bentuk-bentuk pendidikan yang berupaya mendidik peserta didik sesuai dengan keberadaan mereka, atau dengan kata lain pendidikan yang menciptakan kesadaran tentang diri mereka sebagai buruh masa depan dan menyokong kesadaran tersebut dengan kecerdasan kritis akan meruntuhkan proses produksi sosial buruh secara halus. Ketakutan ini memerlukan kontrol yang ketat terhadap tujuan pendidikan, praktik persekolahan, kurikulum, pendidikan guru, dan riset pendidikan.¹⁶

Tidak dapat dipungkiri, pengaruh kekuatan global neoliberal kapitalisme telah merangsek masuk ke dalam pendidikan Aceh. Gerakan islamisasi pendidikan yang digembar-gemborkan hanya berupa slogan yang tidak memiliki dampak apa-apa secara substansial. Otonomi pendidikan yang diberlakukan sejak tahun 2002 lalu, tidak mampu ditangkap oleh para pemangku kepentingan (*stakholder*) pendidikan sebagai peluang untuk membangun dan mewujudkan pendidikan yang otonom, berbasis lokal, humanis, dan transformatif. Pendidikan Aceh yang dikembangkan belum beranjak jauh dari filosofi dan sistem pendidikan nasional dan global yang menempatkan tujuan-tujuan ekonomis dan kebendaan semata sebagai tujuan hakiki.

Tujuan pendidikan menengah dan tinggi di Aceh sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 adalah: (1) pendidikan menengah bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik sesuai

¹⁶ Glenn Rikowski, "The Education White Paper and the Marketisation and Capitalisation of the Secondary Schools System in England", 24th October 2005, bagian I pada <http://journals.aol.co.uk/rikowskigr/Volumizer/entries/571> dan bagian II pada <http://journals.aol.co.uk/rikowskigr/Volumizer/entries/572>, diakses tanggal 9/6/2010.

dengan nilai-nilai Islam yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja, mempersiapkan diri melanjutkan ke pendidikan tinggi/dayah manyang, dan pengabdian masyarakat; dan (2) pendidikan tinggi bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesional dan/atau keterampilan vokasional serta dapat mengembangkan dan menerapkan ajaran agama, ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni.

Pada bagian penjelasan hal ini lebih tegas disebutkan bahwa tujuan utama pendidikan di Aceh adalah mempercepat pencapaian tujuan dan target kebijakan nasional mengenai pendidikan untuk semua (*education for all*), dalam rangka pelaksanaan pesan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yaitu setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai islami, budaya, dan kemajemukan bangsa (Pasal 216 ayat (1) dan (2)). Isi utama yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No.11 Tahun 2006 adalah menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berbasis nilai Islami dan menjamin semua lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi dapat bersaing di pasar kerja global, regional, dan nasional serta menjadi dorongan untuk membangun kehidupan sosial ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat Aceh lebih baik.¹⁷

Meskipun pada bagian isi, nilai-nilai dan karakteristik manusia model pendidikan kapitalis neoliberal masih masih berbaur dengan unsur-unsur sosial spiritual, namun pada bagian penjelasan, karakteristik manusia yang semata-mata tunduk pada kekuatan kapitalis neoliberal tampak kentara, yaitu lulusan yang dapat bersaing di pasar kerja global. Tujuan pendidikan yang semata-mata mempersiapkan peserta didik memasuki pasar kerja sebagai tujuan akhir akan mempengaruhi praktik pendidikan secara menyeluruh.¹⁸

Standarisasi kurikulum, tes standar, manajemen berbasis administrasi, dan pengabaian seperangkat isu-isu keadilan sosial di sekolah tidak akan mampu menumbuhkan manusia yang aktif secara sosial, memiliki kesadaran etis spiritual,

¹⁷ Lihat Penjelasan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan .

¹⁸ Tyack, D., & Cuban, L. *Tinkering toward utopia: A Century of Public School Reform*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1996, hal 18.

empati dan kepedulian sosial, serta jiwa transformatif. Nilai-nilai konsumeristik individual memicu hilangnya kepedulian dan tanggung jawab terhadap keadilan sosial dan sekolah-sekolah hanya mereproduksi nilai-nilai dominan tanpa pernah mengetahuinya. Praktik pendidikan seperti ini justru bertentangan dengan watak pendidikan yang sesungguhnya. Para antropolog dan psikolog mengklaim bahwa model standar dalam praktik pendidikan/sekolah secara inheren tidak efektif dan tidak efisien untuk tingkatan usia berapapun.¹⁹

Dalam konteks ini, label islami dalam pendidikan Aceh perlu dikritisi sehingga tidak sekadar menjadi *lips service* belaka untuk melanggengkan tujuan-tujuan terselubung baik disengaja maupun tidak. Kritisisme dalam pendidikan mengajak semua pihak untuk menyadari bahwa pendidikan bukanlah wilayah yang bebas dari kepentingan-kepentingan ideologi, politik, dan ekonomi. Berbeda dengan paradigma konservatif dan liberal, paradigma kritis menghendaki pendidikan menjadi arena perjuangan politik untuk melakukan perubahan struktur masyarakat secara fundamental menuju masyarakat yang adil baik secara sosial maupun ekonomi.²⁰ Lebih jauh, sebagaimana pemikiran Freire (publikasi tahun 1970), Giroux (publikasi tahun 1997), McLaren (publikasi tahun 1998), dan Shore (publikasi tahun 1992) pendidikan kritis menghendaki analisis terhadap aspek-aspek yang dipolitisasi secara mendalam ke dalam institusi, kebijakan, dan praktik pendidikan.²¹

Dalam perspektif kritisisme, urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, terhadap *'the dominant ideology'* ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidikan adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistim dan sruktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistim sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa bersikap netral, bersikap obyektif maupun berjarak dengan masyarakat (*detachment*) seperti anjuran positivisme. Visi pendidikan adalah melakukan kritik terhadap sistem dominan sebagai pemihakan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas untuk menciptakan

¹⁹ Farrell, J. P., *Improving Learning: Perspectives for primary education in rural Africa*, Paris: UNESCO, 2000, hal.7

²⁰ Douglas Kellner, "Critical Pedagogy, Cultural Studies, and Radical Democracy at the Turn of the Millennium: Reflections on the Work of Henry Giroux", <http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner>, diakses tanggal 9/6/2010.

²¹ Timothy McGettigan, "What is Radical Pedagogy", <http://ezrawinton.com/2008/04/08/what-is-radical-pedagogy/>, diakses tanggal 9/6/2010

sistem sosial baru dan lebih adil. Tugas utama pendidikan adalah ‘memanusiakan’ kembali manusia yang mengalami dehumanisasi karena sistem dan struktur yang tidak adil.²²

Kecenderungan pendidikan Aceh yang cenderung mengadopsi *mainstream* pendidikan publik dengan seperangkat nilai ideologi, sosial, politik, dan ekonomi yang dibawanya menunjukkan apa yang disebut oleh Freire sebagai mental fatalistik bahwa kita (manusia) hanya pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa merubah sesuatu. Seperangkat ideologi pendidikan yang berkembang berupa standarisasi, testing, efisiensi, fektivitas, dan akuntabilitas diterima begitu saja sebagai sesuatu yang baik. Praktik pendidikan yang berorientasi sekadar mencetak lulusan yang siap dipasarkan dipandang sebagai kemajuan dan keunggulan pendidikan Islam. Lebih jauh lagi, penambahan mata pelajaran Islam dan pemberlakuan aturan berpakaian islami dianggap sebagai kemenangan besar. Sikap ini menandakan bahwa para pihak yang terlibat dalam merancang pendidikan Aceh telah masuk ke dalam perangkap imaji dan kontrol ideologi dominan sehingga mereka mengalami “penyakit” yang disebut Freire dengan ketakutan terhadap kebebasan/kemerdekaan (*fear of freedom*).²³

Pendidikan dengan tujuan yang bersifat material profesional semata dalam jangka panjang akan menjadikan masyarakat Aceh tidak lebih sebagai buruh kasar yang mengabdikan pada kekuatan-kekuatan neoliberal kapitalis (lokal/nasional/regional/global) dan dalam situasi tersebut segala sumber daya yang terdapat di Aceh akan sepenuhnya berada dalam genggamannya kontrol kaki tangan kapitalis dan selamanya ditujukan pada kepentingan pemodal baik secara langsung maupun tidak. Filosofi pendidikan berorientasi pasar (*market driven education*) sebagaimana tercermin dalam Qanun Pendidikan 2008 ini akan bekerja semakin efektif melanggengkan pengaruh dan kekuasaan kaum kapitalis ketika pihak legislatif mengesahkan Rancangan Qanun (Rancangan Qanun) Penanaman Modal.

Ketika pendidikan dibatasi pada tujuan sempit (pekerjaan dan finansial), maka pendidikan telah lari dari hakikat memanusiakan manusia dan merenggut hak peserta didik untuk belajar demi tujuan-tujuan yang lebih luas dan manusiawi,

²² Toto Raharjo dkk., (ed.), *Pendidikan Populer (Membangun Kesadaran Kritis)*, Yogyakarta: ReaD Books, 2000, hal. 29.

²³ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, (New York: The Continuum Publishing Group, 1970), hal. 4.

melampaui materi, konsumsi, dan pekerjaan.²⁴ Pada saat yang sama, maka kesenjangan dan ketidakadilan yang dihasilkan dari praktik politik dan ekonomi dominan akan mendapat naturalisasi dan legitimasi melalui pendidikan.²⁵ Pada akhirnya, pendidikan hanya menjadi alat kekuasaan yang melayani segelintir orang dengan mengabaikan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan sosial secara umum.

Berdasarkan hal di atas, maka pendidikan islami Aceh tampaknya masih menggunakan pendekatan apologetik yang idealistik tapi belum merepresentasikan solusi yang bersifat praktis dan dapat dilaksanakan (*applicable*).²⁶ Kecenderungan ini belum mampu memperlihatkan eksklusivitas pendidikan islami sebagai tawaran alternatif bagi pendidikan konvensional yang lebih manusiawi sekaligus menjanjikan perubahan positif bagi dunia. Jika ingin berhasil, maka pendidikan islami secara kreatif harus berani keluar dari sistem yang ada bukan malah mengadopsi islam ke dalam sistem neoliberal kapitalistik.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa upaya mewujudkan pendidikan islami di Aceh masih mengalami tantangan yang cukup berat. Proyek ini telah terjebak dalam mainstream pendidikan nasional baik dari sisi tujuan maupun substansinya. Tidak keliru, jika wajah pendidikan Aceh yang terlihat tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan wajah pendidikan nasional secara keseluruhan, kecuali pada aspek-aspek artifisial semata, seperti pakaian sekolah, penambahan mata pelajaran Islam, dan pemisahan laki-laki dan perempuan dalam kelas.

Menurut penulis, sebelum melangkah lebih jauh, proyek pendidikan islami di Aceh memerlukan refleksi kritis terhadap konteks situasi dan lingkungan sosio politik ekonomi yang melatari kehidupan masyarakat Aceh saat ini. Tanpa ini,

²⁴Roger Simon, bagian Introduction dalam John P. Portelli and R. Patrick Solomon (Eds.), *The Erosion of Democracy in Education: From Critique to Possibilities*, Calgary: Detselig Enterprises Ltd., 2001, hal. 13.

²⁵Peter McLaren, "The Role of Critical Pedagogy in the Globalization Era and the Aftermath of September 11, 2001", <http://redie.uabc.mx/vol3no2/contents-coral.html>, diakses tanggal 9/6/2010.

²⁶Farid Panjwani, "The "Islamic" in Islamic Education, Assessing the Discourse", *Current Issues In Comparative Education*, Teachers College, Columbia University, <http://www.tc.columbia.edu/cice>, diakses tanggal 9/6/2010

pendidikan islam Aceh cenderung akan larut dalam mainstream pendidikan yang berlangsung saat ini dalam mereproduksi nilai-nilai dominan terutama terkait dengan—sadar atau tanpa sadar—kesuksesan di pasar ekonomi sebagai tujuan bukan sebagai alat. Para tokoh pendidikan khususnya perlu melakukan perubahan paradigmatis (*shift paradigm*) dan kembali kepada nilai dasar pedagogi Islam yang berfokus pada tranformasi hati dan pikiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Dave Hill, Global Neo-Liberalism. the Deformation of Education and Resistance, *Journal for Critical Education Policy Studies*, [http://www.jceps.com/index.php?pageID=article &articleID=7](http://www.jceps.com/index.php?pageID=article&articleID=7), diakses tanggal 9/6/2010.
- _____. "Class, Capital and Education in this Neoliberal and Neoconservative Period". <http://libr.org/isc/issues/ISC23/B1%20Dave%20Hill.pdf>, diakses tanggal 20/9/2010.
- _____. "Class, The Crisis of Neoliberal Global Capital, and The Role of Education and Knowledge Workers". <http://radicalnotes.com/2009/03/28/class-the-crisis-of-neoliberal-global-capital-and-the-role-of-education-and-knowledge-workers/>, diakses tanggal 4/3/2013.
- David Kelsh, "The Culturalization of Class and the Occluding of Class Consciousness: The Knowledge Industry in/of education.", *Journal for Critical Education Policy Studies*, <http://www.Jceps.com/index.php?pageID=articlesID=59>, diakses tanggal 27/4/2010.
- Douglas Kellner, "Critical Pedagogy, Cultural Studies. and Radical Democracy at the Turn of the Millennium: Reflections on the Work of Henry Giroux". <http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner>.
- _____, *Toward a Critical Theory of Education*, <http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/>, diakses tanggal 9/6/2010.
- Farid Panjwani, "The "Islamic" in Islamic Education, Assesing the Discourse", *Current Issues In Comparative Education*, Teachers College, Columbia University, 15 desember 2004.
- Farrell. J. P. *Improving Learning: Perspectives for Primary Education in Rural Africa*. Paris: UNESCO, 2000.
- Glenn Rikowski, "The Education White Paper and the Marketisation and Capitalisation of the Secondary Schools System in England", 24th October 2005. Bagian I pada <http://journals.aol.co.uk/rikowskigr/Volumizer/entries/571> dan bagian II pada <http://journals.aol.co.uk/rikowskigr/Volumizer/entries/572>, diakses tanggal 9/6/2010.
- John Williamson, (ed.), "What Washington Means by Policy Reform" dalam *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?*, Washington. D.C: Institute for International Economics, 1990.
- Kompas Cyber Media. "Pencapaian Renstra Pendidikan Nasional Baru Separuh". edisi Kamis 17 Agustus 2007. <http://www2.kompas.com/ver1/Dikbud/0708/16/203303.htm>, diakses tanggal 20/9/2010.
- Les Levidow, "Marketizing Higher Education: Neoliberal Strategies and Counter-Strategies", *Cultural Logic*. Volume 4. Number 1. Fall. 2000, <http://clog.eserver.org/4-1/levidow.html>, diakses tanggal 9/6/2010.
- M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

- N. Hirtt, "Three Axes on Merchandisation". *European Educational Research Journal*, <http://www.wwwords.co.uk/eerj/>, diakses tanggal 20/6/2011.
- Nelly Stromquist dalam Ahmar Mahboob. "Neoliberalism and Madrasas: an Unholy Connention". <http://www.chowk.com/articles/12839>. 16 Oktober 2007, diakses tanggal 16/10/2007.
- Paulo Freire. *Pedagogy of the Oppressed*, New York: The Continuum Publishing Group, 1970.
- Peter McLaren. The Role of Critical Pedagogy in the Globalization Era and the Aftermath of September 11. 2001. <http://redie.uabc.mx/vol3no2/contents-coral.html>, diakses tanggal 9/6/2010.
- Qanun Aceh No. 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Qanun Aceh No. 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. (Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh, 2008).
- Roger Simon, dalam bagian Introduction John P. Portelli and R. Patrick Solomon (Eds.). *The Erosion of Democracy in Education: From Critique to Possibilitie*, Calgary: Detselig Enterprises Ltd., 2001.
- Sunarsip, "Menggugat Neoliberalisme ?", *Republika*, 8 Juni 2009.
- Timothy McGettigan, "What is Radical Pedagogy", <http://ezrawinton.com/2008/04/08/what-is-radical-pedagogy/>, diakses tanggal 9/6/2010.
- Toto Raharjo dkk, (ed.), *Pendidikan Populer (Membangun Kesadaran Kritis)*, Yogyakarta: ReaD Books, 2000.
- Tyack. D., & Cuban. L, *Tinkering toward utopia: A century of public school reform*, Cambridge. MA: Harvard University Press, 1996.
- Yusuf al-Qardhawi, *Islam dan Globalisasi Dunia*, terj. dari buku *Al-Muslimun wa Al-Aulamah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. I, 2001.